

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Melihat ini, pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life Skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dilandasi pada nilai-nilai Pancasila.

Secara mendasar landasan nilai-nilai Pancasila menunjukkan bahwa sistem pendidikan nasional menempatkan peserta didik sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan segala fitrahnya dengan tugas memimpin pembangunan kehidupan yang berharkat dan bermartabat, manusia yang bermoral, berbudi luhur, dan berakhlak mulia.

Melihat manusia secara fitrahnya diciptakan mendapatkan amanah atau tugas yaitu sebagai pemimpin. Dengan tugas yang begitu mulai dan juga penuh tanggung jawab maka manusia dibekali dengan Pendidikan, bimbingan-bimbingan ataupun pelatihan yang menunjang daripada tugas tersebut. Oleh karena itu, pendidikan merupakan bagian dari upaya memberdayakan peserta didik untuk berkembang menjadi manusia seutuhnya, menjunjung tinggi dan memegang teguh norma-norma agama dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, makhluk individu, maupun makhluk sosial.

Perspektif peserta didik sebagai makhluk sosial, pendidikan merupakan wahana penting untuk mengajarkan norma-norma, mensosialisasikan nilai-nilai, menanamkan sifat tanggung jawab dan menumbuhkan etos kerja pada peserta didik. Melalui pendidikan juga dituntut harus mampu

memupuk kepribadian bangsa, memperkuat identitas dan jati diri bangsa dengan menonjolkan berbagai budaya serta kearifan lokal yang ada di bumi Nusantara. Selain itu, pendidikan harus selalu memperbarui konsep pembelajaran agar selalu relevan dengan perkembangan jaman. Dengan demikian adanya pendidikan yang terarah melalui pembelajaran yang baik dapat menghasilkan sumberdaya manusia bermutu memiliki pengetahuan, menguasai teknologi, kemampuan *entrepreneur*, yang menjadi bagaian pilar utama aktivitas perekonomian nasional.

Pendidikan kewirausahaan (*entrepreneur*) merupakan salah satu program Kementerian Pendidikan Nasional yang pada intinya adalah pengembangan metodologi pendidikan yang bertujuan untuk membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif, dan wirausaha. Program ini ditindak lanjuti dengan upaya mengintegrasikan metodologi pembelajaran, pendidikan karakter, pendidikan ekonomi kreatif, dan pendidikan kewirausahaan ke dalam Kurikulum sekolah.

Untuk membangun semangat kewirausahaan dan memperbanyak wirausahawan, Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan.¹ Instruksi ini mengamanatkan kepada seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mengembangkan program-program kewirausahaan termasuk didalamnya disebutkan pelaksanaan pembinaan dan pendidikan kewirausahaan. Pemerintah menyadari betul begitu pentingnya dunia usaha yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional, sehingga harus diupayakan untuk ditingkatkan secara terus menerus.

Bukti lain dapat kita lihat pada ajang pemilu tahun 2019, isu peningkatan kewirausahaan menjadi pembahasan sensitif dan tercatat dalam visi misi salah satu calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pemilu 2019.

¹. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1995 <https://www.bphn.go.id/data/documents/95ip004.pdf>, diakses pada tanggal 5 Februari 2020 Jam 12.30 WIB

Bonus demografi dan hadirnya Revolusi Industri 4.0 harus dihadapi dengan cara memunculkan *entrepreneurs* baru terutama dari kalangan generasi muda/melenial, yang difasilitasi dengan mempercepat tumbuhnya *santripreneur* melalui kemitraan pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang sejenis, dengan dunia kerja.² Melalui berbagai upaya dan usaha pemerintah diharapkan budaya berwirausaha akan menjadi bagian dari etos kerja masyarakat dan bangsa Indonesia, sehingga dapat melahirkan *entrepreneurs* baru dari berbagai daerah dengan kearifan lokal masing-masing.

Pembelajaran berbasis kearifan lokal merupakan suatu pembelajaran yang berorientasi pada integrasi nilai-nilai kerarifan lokal (*local Wisdom*) suatu masyarakat kedalam materi pembelajaran.³ Kearifan budaya lokal (*local wisdom*) sangat cocok untuk membangun dan mengangkat nilai-nilai karakter siswa yang merupakan efek penggiring dalam suatu pembelajaran di sekolah. Maksud dari pembelajaran berbasis kearifan lokal yaitu strategi pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sebagai sarana belajar, sumber belajar atau media belajar. Hal ini diharapkan dapat memupuk rasa cinta terhadap budaya lokal suatu daerah.

Membahas kearifan lokal dengan pengertian yang luas bahwa kearifan lokal bukan hanya terungkap dari bentuk dan pernyataan rasa keindahan melalui kesenian belaka, akan tetapi termasuk segala bentuk dan cara-cara berperilaku, bertindak, serta cara pandang suatu masyarakat. Merebaknya budaya mancanegara yang dikemas sedemikian hebatnya salah satu melalui media komunikasi membuat keberadaan kearifan lokal mudah tergeser dari generasi muda melenial. Salah satu tindakan dalam rangka melestarikan budaya lokal melalui jalur pendidikan. Dijadikannya kearifan lokal sebagai sumber belajar siswa akan memberikan pemahaman tentang budaya setempat kepada peserta didik.

² . Visi Misi Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin, *Meneruskan Jalan Perubahan Untuk Indonesia Maju*, (Tim Pemenang 01 Pemilu 2019. 2018), 6

³ . Prof. Dr. Heri Pratikno, *Pembelajaran Kewirausahaan dan Pemberdayaan UMKM Berbasis Kearifan lokal penguatan ekonomi*, (Malang:Kemenristek, 2015), 28

Kabupaten Kudus adalah kota dagang dan industri yang memiliki berbagai perusahaan, serta menjadi sentra ekonomi kecil dan menengah yang berkembang pesat dalam menopang perkonomian masyarakat. Selain itu, kota Kudus juga menjadi kota santri yang kaya akan budayanya, serta mempunyai kearifan lokal yang telah tertanam dalam kehidupan masyarakatnya. Perwujudan kearifan lokal di kabupaten kudus baik berupa tradisi, religi, seni dan sosial masyarakat tidak terlepas dari asal usul ataupun sejarah perkembangan kota Kudus yang diprkersai oleh sunan Kudus.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M Ihsan, berdasarkan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kudus Tahun 2017, tercatat bahwa usaha industri pengolahan mencapai angka 65,33%, dan perdagangan 24,90%.⁴ Melihat data diatas maka, data ini cukup beralasan kiranya kota kudus disebut sebagai kota industri. Sebagai Kota industri maka tidak menuntut kemungkinan masyarakatnya akat berorientasi pada wirausaha (*enterpreneur*).

Dalam perkembangannya kota Kudus menjelma menjadi kota dagang dan Industri serta kota santri sangat menghipnotis masyarakatnya untuk menjadi *enterpreneur*. Fenomena masyarakat Kudus menjadi pedagang yang berbudi luhur tidak lepas dari pada pengaruh ajaran Sunan Kudus yang dikenal dengan *gusjigang*. Gusjigang merupakan akronim dari “*gus*” adalah bagus yang artinya berperilaku baik, “*ji*” adalah “*ngaji*” artinya berilmu atau cerdas, dan “*gang*” adalah dagang atau berwirausaha “*enterpreneur*”.⁵ Filosofi *gusjigang* itu sendiri bersumber dari Sunan Kudus yang sampai saat ini sebagai penanda ataupun ciri masyarakat Kudus sebagai perwujudan karakter

⁴ M. Ihsan, *Gusjigang Karakter Kemandirian Masyarakat Kudus Menghadapi Industrialisasi*, IQTISHADIA. Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 10 No 2 (2017) diakses tanggal 23 Juli 2019. ” <https://media.neliti.com/media/publications/228000-gusjigang-karakter-kemandirian-masyaraka-bel4f327.pdf>

⁵ Nur Said, *Jejak Perjuangan Sunan Kudus Dalam Membangun Karakter Bangsa*, (Bandung: Brilian Media Utama.2011), 26

masyarakat yang mempunyai prilaku bagus, berilmu dan mempunyai jiwa *enterpreneur*.

Di sisi lain, *gusjigang* yang menjadi ciri budaya lokal masyarakat kudus telah mengalami degradasi seiring dengan perkembangan jaman serba modern ini. Falsafah Gusjigang dianggap suatu yang aneh dan asing bagi penerusnya. Ketidak tahuan mereka terhadap *gusjigang* dikarenakan informasi ataupun penanaman nilai kearifan lokal mulai menipis. Dan pada akhirnya sekarang mereka tidak mengetahui apalagi memahami dan mengamalkan nilai-nilai falsafah *gusjigang* sebagai dasar kehidupan sehari-hari.⁶ Melihat pentingnya ajaran luhur atau nilai-nilai falsafah *gusjigang* sebagai kearifan lokal, perlu dipertahankan dan dikembangkan sebagai penanda kekayaan kasanah budaya dan identitas kota Kudus. Sebagaimana yang disampaikan Said, budaya *gusjigang* dengan tiga *core values* adalah bagian dari warisan budaya lokal yang diwariskan oleh Sunan Kudus yang perlu dikembangkan dan juga dilestarikan. Salah satu jalur yang relevan dalam pengembangannya nilai-nilai tersebut melalui etnopedagogi.⁷

Berangkat dari penjelasan diatas, ide untuk mengaktualisasikan pembelajaran yang berorientasi pada nilai-nilai kearifan lokal menjadi suatu hal yang sangat penting ditengah gencarnya kampanye pendidikan karakter. Suatu pendidikan yang diwajibkan mengangkat identitas daerah masing-masing. Hal ini dilakukan pemerintah dengan maksud supaya keunikan, khasanah suatu daerah, akan mempunyai ciri dan kelebihan tersendiri dengan daerah lain. Dengan kelebihan tersebut akan menjadi daya jual suatu daerah yang selanjutnya menjadi pengembangan kasanah budaya bangsa dan perekonomian nasional.

Upaya meningkatkan perekonomian nasional pemerintah berharap lahirnya wirausahawan atau *enterpreneuers* muda yang mempunyai nilai jual,

⁶ Maharomiyati, *Pewarisan Nilai Falsafah Budaya Lokal Gusjigang Sebagai Modal Sosial Dipondok Pesantren Enterpreneur Al Mawaddah Kudus*. Jess 5 no 2 (2016) diakses 23 September 2019 <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess>

⁷ Nur Said, *Gusjigang Dan Kesenambungan Budaya Sunan Kudus*, ISLAM EMPIRIK. Jurnal Vol 6, No 2 (2013), 117

entrepreneur yang profesional, yang mampu bersaing ditingkatan nasional ataupun internasional. Oleh karena itu, pemerintah melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berharap terciptanya sumber daya manusia yang unggul, lulusan SMK yang berkemajuan, mampu dan siap bekerja, berani bersaing, bahkan diharapkan sebagai pencipta lapangan kerja bagi masyarakat.

Permasalahan lain muncul, merujuk dari pada data Badan Pusat Statistik pada kuartal IV Tahun 2018 tingkat pengangguran dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) paling tinggi dibanding dengan lulusan dari jenjang pendidikan lainnya. Diperoleh data Angka pengangguran dari lulusan SMK pada Agustus 2018 mencapai 11,25%, lulusan SMA 7,95%, lulusan SMP 4,8%, lulusan Diploma 6,02%.⁸ Pada tahun 2019 di kuartal ke II tingkat pengangguran dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih memosisikan paling tinggi yaitu 10,42%, SMA 7,92% dan Universitas 5,99%.⁹ Permasalahan tingginya angka pengangguran dari lulusan SMK tidak sejak sejalan sebagaimana harapan pemerintah sebagaimana diuraikan diatas.

Menghadapi permasalahan tersebut, berbagai upaya telah di lakukan pemerintah mulai dari pembinaan-pembinaan lembaga lembaga terkait, sampai pada pemberian pelatihan-pelatihan bagi para pendidik di Sekolah Menengah Kejuruan. Contoh langkah kongkrit pemerintah salah satunya adalah, pada Kwartal I Tahun 2019 pemerintah telah menyiapkan anggaran yang khusus ditujukan untuk pengembangan kewirusahaan di SMK. Kementerian Pendidikan Dan Menengah telah menerbitkan Peraturan Kuasa Penguunaan Anggaran Satuan Kerja Direktorat

⁸ Muhammad Hendartiyo , *BPS Catat Tingkat Pengangguran Terbuka Paling Tinggi Lulusan SMK*, <https://bisnis.tempo.co/read/1202618/bps-catat-tingkat-pengangguran-terbuka-paling-tinggi-lulusan-smk>, Diakses pada tanggal 10 februari 2019. Jam 23.00 WIB

⁹ Agustiyanti, *Pengangguran Bertambah Jadi 7,05 Juta orang per Agustus, Tertinggi SMK*, <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5e9a4e558c461/pengangguran-bertambah-jadi-705-juta-orang-per-agustus-tertinggi-smk>, Diakses Pada tanggal 10 November 2019. 11.30 WIB

Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan No: 4819/DS.2/KU/2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Bantuan Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan SMK Tahun 2019. Dari peraturan tersebut dituangkan Sekolah Menengah Kejuruan akan mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengembangan pembelajaran kewirausahaan siswa di SMK, menyiapkan lulusan SMK untuk menjadi wirausaha.¹⁰

Melihat upaya pemerintah ini, disambut baik oleh kepala sekolah SMK NU Ma'arif 3 Kudus yang mana merupakan bagian dari sekolah yang telah memperoleh hibah anggaran pengembangan pembelajaran kewirausahaan pada tahun ajaran 2019. Dari bantuan Kementerian Pendidikan dan Menengah yang diterima SMK NU Ma'arif 3 Kudus telah mengembangkan berbagai kegiatan, dan program pembelajaran kewirausahaan yang berbasis kearifan lokal yang dituangkan kedalam kurikulum sekolah dengan menekankan konsep kewirausahaan berdasar filosofi gusjigang. Sebagaimana yang disampaikan Waka Kurikulum SMK NU Ma'arif 3 Kudus, bahwa program pengembangan *entrepreneurship* berbasis kearifan lokal gusjigang di SMK NU Ma'arif 3 Kudus mulai dikembangkan.¹¹ Sebagaimana contohnya dalam pembelajaran *entrepreneurship* siswa diajarkan mengelola hasil pertanian. Hasil pertanian ini dijual kemasayarakat sekitar, dan bukan semata mata mencari profit atau keuntungan saja. Siswa diajarkan, dan dibina untuk menumbuhkan jiwa *enterpreanur* yang santun, jujur, dan kreatif serta mengedepankan sikap (*attitude*) berdagang sebagai ciri orang Kudus yang didasarkan pada kearifan lokal *gusjigang*.

Filosofis gusjigang akan melahirkan individu yang mandiri dan bertanggung jawab ditandai dengan capaian kompetensi yang mumpuni sekaligus memiliki inisiatif untuk mempertahankan hidup melalui wirausaha sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki. menjelang MEA

¹⁰ KEMENDIKBUD, *Peraturan Kuasa Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan No: 4819/DS.2/KU/2019*.

¹¹ Dokumentasi peneliti awal di SMK NU Ma'arif 3 Kudus, 7 Juli 2020

(Masyarakat Ekonomi Asean) yang sudah didepan mata, pemerintah Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan Langkah strategis dalam sektor tenaga kerja, sektor infrastruktur, dan sektor industri ¹²

Dalam rangka menghadapi MEA terkait dengan penyiapan tenaga kerja trampil dari lulusan sekolah menengah kejuruan maka pemerintah mengeluarkan Inpres No.9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Perwujudan revitalisasi dituangkan dalam sepuluh Langkah revitalisasi SMK yaitu 1. Revitalisasi sumber daya manusia, 2. Membangun SAS berbasis SIM, 3. *Link and match* dengan industry, 4. Kurikulum berbasis industri, 5. *Teaching factory*, 6. Penggunaan media video tutorial dan portofolio berbasis video *e-report skill*. 7. Uji sertifikasi profesi., 8. Pemenuhan sarana dan prasarana. 9. Mengembangkan kearifan lokal, 10. Peran SMK sebagai penggerak ekonomi lokal ¹³.

Gusjigang jika kemudian dikaitkan dengan 10 langkah revitalisasi SMK, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Langkah revitalisasi tersebut telah diwakilkan oleh falsafah Gusjigang dimana siswa harus memiliki pribadi yang berakhlak mulia (Gus), memiliki kompetensi sesuai dengan bidang yang diperoleh melalui pengasah intelektualitas (Ji) dan memiliki keuletan secara eksistensial dalam berwirausaha (Gang).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pembelajaran berbasis kearifan lokal Gusjigang dalam menumbuhkan karakter *Enterpreneurship* di SMK NU Ma’arif 3 Kudus”.

¹² Nationalgeographic, 2015, *Pahami masyarakat ekonomi asean (MEA)*. Online. <https://nationalgeographic.grid.id/read/13295658/pahami-masyarakat-ekonomi-asean-mea-2015>, Diakses pada tanggal 5 Januari 2021

¹³ Hadam. Et all. 2017, *Strategi implementasi revitalisasi SMK (10 langkah revitalisasi SMK)*. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakanag diatas dan dengan mempertimbangkan keterbatasan peneliti, maka peneliti ini dibatasi pada permasalahan yang hanya berkaitan dengan pembelajaran berbasis kearifan lokal dalam menumbuhkan karakter *enterpneuership* pada siswa di SMK NU Ma'arif 3 Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka permasalahan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pembelajaran berbasis kearifan lokal *Gusjigang* dalam menumbuhkan karakter *Entrepreneurship* pada siswa SMK NU Ma'arif 3 Kudus?
2. Apa Faktor pendukung Pembelajaran berbasis kearifan lokal *Gusjigang* dalam menumbuhkan karakter *Entrepreneurship* pada siswa SMK NU Ma'arif 3 Kudus?
3. Apa faktor penghambat Pembelajaran berbasis kearifan lokal *Gusjigang* dalam menumbuhkan karakter *Entrepreneurship* pada siswa SMK NU Ma'arif 3 Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendiskripsikan bagaimana Pembelajaran berbasis kearifan lokal *Gusjigang* dalam menumbuhkan karakter *Entrepreneurship* pada siswa SMK NU Ma'arif 3 Kudus.
2. Untuk mendiskripsikan Faktor pendukung Pembelajaran berbasis kearifan lokal *Gusjigang* dalam menumbuhkan karakter *Entrepreneurship* pada siswa SMK NU Ma'arif 3 Kudus.
3. Untuk mendiskripsikan faktor penghambat Pembelajaran berbasis kearifan lokal *Gusjigang* dalam menumbuhkan karakter *Entrepreneurship* pada siswa SMK NU Ma'arif 3 Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari peneliti, antara lain:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman ilmiah bagi penulis dalam mengkaji pembelajaran berbasis kearifan lokal *gusjigang*, serta memberikan referensi dalam menanamkan jiwa *Entrepreneur* pada siswa SMK dalam kultur sekolah,
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi peneliti lain terkait dengan pembelajaran pembelajaran berbasis kearifan lokal *gusjigang* di SMK.
- c. Sebagai referensi untuk membentuk kebijakan terkait dalam pembelajaran berbasis kearifan lokal *gusjigang*.
- d. Sebagai umpan balik pelaksanaan pembelajaran berbasis kearifan lokal *gusjigang* dalam membentuk karakter *Entrepreneurship* di SMK.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menyajikan data secara lengkap dan komprehensif, penulisan penelitian ini mengikuti sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua menguraikan tentang landasan teori yang dijadikan dasar pengkajian penelitian tentang “Pembelajaran berbasis kearifan kokal *gusjigang* dalam membentuk karakter *entrepreneurship* di SMK NU Ma’arif 3 Kudus” pada bab ini pertama tama dikaji teori Pembelajaran, pembelajaran berbasis kearifan lokal yang merupakan bagian dari inti penelitian ini, sehingga diketahui pengertian pembelajaran dan pembelajaran berbasis kearifan lokal. Kedua pada bab ini pula akan dibahas tentang kearifan lokal *gusjigang*, serta *gusjigang* dalam membentuk karakter *entrepreneurship*.

Pada Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian, pengabsahan serta teknik analisis data.

Bab keempat berisis tentang hasil penelitian yang akan menjawab rumusan masalah penelitian ini yaitu: Mendiskripsikan bagaimana Pembelajaran berbasis kearifan lokal gusjigang dalam membentuk karakter *entrepreneurship* Di SMK NU Ma'arif 3 Kudus. Mendiskripsikan faktor pendukung dan penghambat Pembelajaran Pembelajaran berbasis kearifan lokal gusjigang dalam membentuk karakter *entrepreneurship* Di SMK NU Ma'arif 3 Kudus.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir adalah penutup terdiri dari kesimpulan dan saran yang mungkin dapat dijadikan referensi dan pedoman sebagai bahan pertimbangan serta lampiran-lampiran lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

